



Asal Tak Korupsi & Mark-up Anggaran Ahok Setuju Gaji Pejabat Naik

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur Ahok menyetujui gaji pejabat Pemprov dan DPRD dinaikkan. Langkah ini diyakini bisa mencegah korupsi dan praktik mark-up.

"Saya dari dulu mendukung semua gaji PNS, DPRD, DPR, bupati, walikota, gubernur naikin saja. Masa BUMD dan BUMN gajinya lebih gede. Boleh, naikin saja lebih gede agar profesional," ujar Ahok di Balaikota, Kamis (25/6), menanggapi usulan Asosiasi DPRD belum lama ini.

Sesuai dengan data, gaji untuk anggota DPRD saat ini mencapai Rp32 juta/bulan. Pendapatan walikota dari gaji ditambah tunjangan jabatan, tunjangan kinerja daerah (TKD) dan TKD Dinamis bisa mengantongi sekitar Rp75 juta/bulan, Sedangkan pejabat setingkat kepala dinas Rp72 juta/bulan.

Menurut Ahok, jika kebijakan tersebut disetujui maka harus dilakukan pembuktian terbalik terhadap harta pejabat. Tujuannya agar tindak korupsi bisa diminimalisir.

"Kalau pejabat enggak bisa membuktikan harta, pajak yang dia bayar dan gaya hidupnya itu disita buat negara. Jadi mesti seimbang," katanya.

PENDAPATAN KECIL

Setelah gaji gede, pejabat juga harus berkomitmen tidak akan mengambil uang negara lantaran telah menerima gaji dan tunjangan yang besar. Selama ini, kata Ahok, oknum pejabat yang korupsi didasari dengan pendapatan yang kecil.

Menurut Ahok, dengan menaikkan tunjangan dan gaji pejabat justru akan menghemat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Karena bisa mengurangi praktik korupsi yang selama ini meraja lela.

"Saya yakin negara lebih hemat kalau dinaikin gajinya. Asal enggak korupsi dan mark-up lagi, pasti lebih hemat," tandasnya. (john/st/o)